

KAJIAN METODE SISTEM NILAI UNTUK MENGEVALUASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSII B. Putu Bintana¹, I G. A. Adnyana Putera², dan I B. Rai Adnyana²

Abstrak:Metode evaluasi pelelangan konstruksi dengan sistem gugur berdasarkan kriteria harga terendah sering menimbulkan masalah kualitas, meningkatkan peluang perselisihan dan durasi proses kontrak. Dipihak lain, metode evaluasi sistem nilai yang dapat memberikan jaminan kualitas kepada pengguna, jarang dipakai karena panitia sering mengalami kesulitan dalam menilai dan menentukan kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Untuk itu diperlukan kajian mendalam tentang kriteria penilaian untuk mengevaluasi pengadaan konstruksi.

Penelitian ini dilaksanakan di Bali dengan pendekatan kualitatif induktif, yang melibatkan 45 praktisi ahli yang terlibat langsung dalam pelelangan jasa konstruksi yang dievaluasi dengan sistem nilai. Purposif sampling digunakan untuk menentukan responden, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara dan kuisioner dengan mengadopsi Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai alat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: metode evaluasi jasa konstruksi dengan sistem nilai dapat menentukan kontraktor yang mampu memberikan kepuasan lebih tinggi kepada pemilik daripada sistem gugur apabila kriteria penilaiannya jelas, terukur dan transparan. Dari sisi aspek penilaian ada dua aspek utama yang perlu dinilai agar diperoleh jaminan kualitas yaitu aspek teknik dan biaya dengan bobot berturut-turut 60% dan 40%. Aspek teknik mencakup: a) keberadaan rencana kerja (13,51%) yang terdiri atas: keberadaan metode kerja (4,12%), peralatan (4,05%), bahan (3,46%), dan tenaga kerja (1,88%); b) kompetensi tenaga kerja (19,91%) yang terdiri atas: kompetensi manajemen proyek (2,31%), keberadaan tenaga kualifikasi ahli (7,92%), dan keberadaan tenaga kualifikasi terampil (9,68%); c) keberadaan peralatan penunjang (15,54%), yang terdiri atas: dukungan alat angkut (4,79%), dukungan alat angkut (6,17%), alatukur dan alat lainnya (4,58%), d) keberadaan manajemen waktu (6,30%) yang terdiri atas: keberadaan network planning (4,13%), keberadaan bar chart (1,03%), dan keberadaan kurva-S (1,14%); dan e) keberadaan penjaminan mutu (2,14%) yang terdiri atas: keberadaan manajemen mutu (1,95%), keberadaan penjaminan mutu kinerja (0,66%), dan keberadaan penjaminan mutu bahan (2,14%). Dari aspek biaya perlu dinilai besarnya nilai penawaran dan tingkat kewajaran harga dengan bobot berturut-turut 14,34% dan 25,66%.

KataKunci : *Metode Evaluasi, Sistem Nilai, Merit Point System, AHP, pengadaan konstruksi*

THE STUDY ON MERIT POINT SYSTEM FOR EVALUATING THE CONSTRUCTION PROCUREMENT

Abstract: The construction procurement evaluation method using lowest price conforming methods often causes some quality problems for owners and increases the probability of dispute and delay during the contract execution. On the other hand, merit point system evaluation method can provide quality assurance, but the procurement committees are often difficult to apply it, and to determine measurable criteria evaluation. Therefore, it is necessary for a more in-depth study to find out the criteria evaluation for construction procurement.

The research conducted in Bali, and adopted inductive qualitative approach involving 45 experts participated in construction procurements using merit point system evaluation. Purposive sampling is applied to determine the respondents come from all actors included during procurement process. The data was collected through interviews, observation participant and questionnaires, and the Analytic Hierarchy Process (AHP) is chosen to analyse them.

The result shows that : the merit point system evaluation for construction procurement can determine the contractor provides better quality than the lowest price conforming method when the evaluation criteria are clear, measurable and transparent in the bidding document. There are two principle aspects that must be considered to assure the quality that is: the technical aspect and the cost that weight consecutively 60% and 40%. The technical aspect comprises of : a) the existence of work plan (13.51%), comprising of construction methods (4.12%), supporting equipment (4.05%), supporting material (3.46%), supporting workers (1.88%); b) competencies of human resources (19.91%), comprising of project management competencies (2.31%), existence of expert (7.92%) and certificated human resources (9.68%); c) existence of supporting equipments (15.54%) consisted of lifting support (4.79%), transportation support (6.17%), surveying support equipment (4.58%); d) the existing of time management (6.30%) consisted of network planning (4.13%), bar chart (1.03%), and S-curve (1.14%); and e) existence of quality assurance (2.14%) consisted of quality management system (1.95%), performance quality management (0.66%) and material management quality (2.14%). From price point of view, it must be evaluated the fairness of price and price offer that weighs consecutively 25.66% and 14.34%.

Keywords : evaluation method, merit point system. AHP, construction procurement

¹Mahasiswa Program Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana.

²Staf Pengajar Program Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPBJP) dan peraturan-peraturan Presiden tentang hal yang sama, ada tiga metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penawaran yaitu : a) Sistem Gugur; b) Sistem Nilai (Merit Point System); c) Sistem Penilaian Biaya selama umur ekonomis. Namun pada Perpres 54/2010, evaluasi penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi lebih diarahkan menggunakan metode evaluasi sistem gugur dan pemenang ditentukan berdasarkan penawaran harga terendah. Hal ini dilakukan karena metode evaluasi sistem nilai memerlukan penjelasan yang detail mengenai komponen yang dinilai sehingga memerlukan panitia lelang yang mumpuni dan waktu untuk menyiapkan dokumen lelang yang relatif lebih lama daripada metode lainnya.

Berdasarkan pengalaman, penggunaan metode evaluasi sistem gugur sering menghasilkan konstruksi yang kurang berkualitas karena panitia lelang cenderung menilai hanya berdasarkan nilai terendah dan kurang memperhatikan kemampuan teknik peserta lelang. Disamping itu, kontraktor kadang-kadang menawar sangat rendah sebagai strategi memenangkan lelang dan mengharapkan ada negosiasi harga selama pelaksanaan proyek. Selain itu, peserta lelang secara berkelompok membuat kesepakatan mengenai pemenang lelang proyek tersebut, sehingga penyedia jasa tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa menerima karena telah sesuai dengan peraturan. Hal ini menjadi sangat tidak menguntungkan penyedia jasa. Sebagai akibatnya adalah : pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana, kualitas konstruksi menjadi rendah, waktu penyelesaian proyek sering terlambat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, pilihan metode evaluasi lainnya adalah menggunakan metode evaluasi sistem nilai yang mempertimbangkan nilai teknis dan nilai harga penawaran. Namun demikian panitia harus berhati-hati dan memahami benar kegiatan yang akan dilaksanakan. Beberapa kerawanan dalam menerapkan evaluasi sistem nilai adalah penentuan indikator penilaian, bobot setiap indikator dan pemberian nilai (score) setiap indikator dari peserta lelang. Untuk itu perlu dikaji mengenai faktor-faktor dan bobot setiap faktor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi persyaratan administrasi,

teknik dan biaya dari pevelangan pekerjaan jasa konstruksi sehingga dapat memudahkan pekerjaan panitia lelang dalam menerapkan metode evaluasi sistem nilai.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan untuk menilai kemampuan teknis kontraktor dan berapa nilai bobot faktor tersebut ?
2. Berapa bobot penilaian komponen kemampuan teknis dibandingkan bobot penilaian harga penawaran ?
3. Bagaimana persepsi para pengguna jasa / owner, serta pihak-pihak yang pernah terlibat, terhadap metode sistem nilai (*merit point system*) pada proses tender / pengadaan jasa konstruksi

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mendapatkan gambaran acuan yang lebih jelas tentang kriteria dan faktor-faktor yang harus dijadikan unsur penilaian dokumen penawaran peserta tender yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai (*merit point system*), berapa bobot kriteria dan faktor tersebut, serta bagaimana persepsi para pengguna jasa/owner serta pihak-pihak yang pernah terlibat pada proses pengadaan jasa konstruksi yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai (*merit point system*)

TINJAUAN PUSTAKA

Hendrickson (2000), menyatakan bahwa pemilihan rekanan calon pelaksana konstruksi merupakan bagian yang bersifat kritis dalam keseluruhan proses pengadaan suatu fasilitas fisik. Abduh dan Wirahadikusumah (2005) menyatakan bahwa, terdapat beberapa praktik calon kontraktor, sebagai strategi penawaran yang dapat menimbulkan perselisihan atau penundaan yang dapat merugikan pemilik. pada saat pelaksanaan. Dilain pihak, praktik evaluasi penawaran yang sering digunakan oleh panitia lelang pada instansi pemerintah untuk menentukan kontraktor adalah sistem gugur atau biaya terendah. Apabila penilaian hanya menitik beratkan pada satu kriteria saja akan sangat riskan menimbulkan masalah kualitas hasil konstruksi karena kontraktor memakai berbagai strategi penawaran yang dapat merugikan pemilik termasuk strategi "banting harga".

True(1988) mengindikasikan bahwa penawaran biaya oleh para calon kontraktor di

Amerika Serikat memiliki tingkat akurasi yang sangat bervariasi, baik pada proyek-proyek besar maupun kecil.

Menurut Abdul dan Wirahadikusumah (2005), variasi penawaran biaya dalam suatu pelelangan di Indonesia diduga lebih tinggi daripada yang terjadi di negara-negara maju. Pengguna jasa perlu memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan perkiraan biaya yang dihitung dengan keahlian dan berdasarkan data yang akurat. HPS dapat digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan rinciannya, namun tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menggugurkan penawaran. HPS hanya digunakan sebagai acuan untuk menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan, apabila terdapat kasus penawaran biaya yang terlalu rendah.

Menurut Eriksson and Westerberg (2011), jika fokus pemilihan kontraktor dengan biaya terendah, maka harus siap menerima risiko peningkatan biaya dan perpanjangan waktu, serta kualitas yang rendah. Melalui evaluasi penawaran yang mempertimbangkan teknik kerja, kompetensi dan pengalaman akan dapat mengurangi *overruns* waktu dan biaya.

Pemilihan kontraktor dengan metode evaluasi sistem nilai (*merit point system*) nampaknya dapat digunakan oleh panitia pengadaan untuk mengevaluasi penawaran calon kontraktor untuk menghindari praktik-praktik penawaran dari calon kontraktor yang tidak wajar tersebut. Namun Mustafa pada Khalid Mustafa Weblog menyarankan panitia harus berhati-hati jika memilih metode evaluasi sistem nilai karena membutuhkan usaha yang lebih dan kepiawaian panitia dalam menentukan kriteria dan mengolah data yang kompleks serta siap mencantumkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur pada dokumen pengadaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis induktif, dimana pengumpulan data bukan untuk mendukung atau menolak hipotesis, tetapi untuk mendapatkan keterangan mengenai suatu kejadian yaitu pengadaan jasa konstruksidengan metode evaluasi sistem nilai.

Penelitian dilakukan di Bali, khususnya pada Instansi Pemerintah yang pernah menggunakan metode evaluasi sistem nilai pada proses pengadaan jasa konstruksinya. Subjek penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang pernah menggunakan metode evaluasi sistem nilai,

yaitu para pejabat pembuat komitmen (PPK), para panitia pengadaan, para pemenang lelang, serta para peserta lelang dan pengawas teknik dengan responden masing-masing sebanyak 5 orang, 10 orang, 10 orang, 15 orang dan 5 orang sehingga seluruhnya berjumlah 45 orang.

Data dikumpulkan dalam dua tahap melalui wawancara, observasi partisipan, dan kuisioner. Tahap pertama bertujuan untuk menentukan hierarki faktor (indikator), sedangkan tahap kedua ditujukan untuk mengetahui matriks perbandingan level kepentingan antar indikator yang digunakan untuk menentukan bobot setiap faktor maupun subfaktornya.

Analisis level kepentingan masing-masing indikator dilakukan dengan metode Analytic Hierarchy Proses (AHP) sehingga kriteria evaluasi yang terdiri atas indikator dan bobotnya, dapat ditentukan.

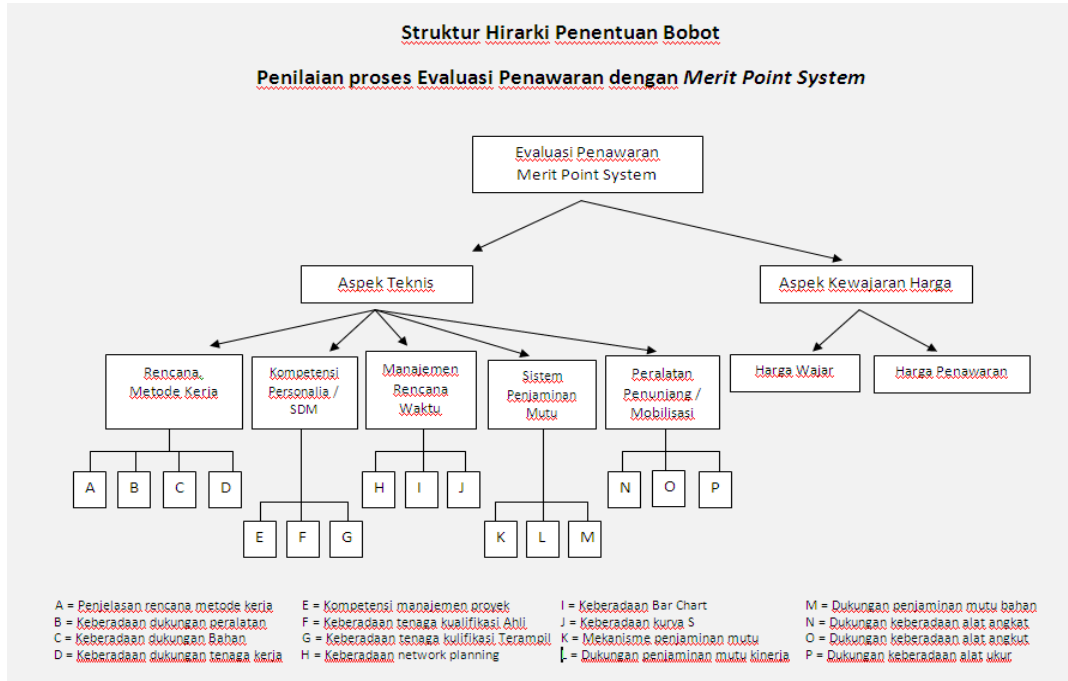
Ringkasan proses pelaksanaan penelitian dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut. Tahap pertama, menentukan faktor atau indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi penawaran, yang dilakukan melalui kajian literatur dan *brainstorming* dengan para praktisi, sehingga kuisioner untuk menentukan hierarki indikator penilaian dapat disusun.

Pada tahap kedua, menyebarkan kuisioner kepada 45 responden yang ditentukan dengan purposif sampling. Data yang diperoleh diolah sehingga dapat disusun hierarki indikator penilaian pengadaan jasa konstruksi.

Tahap ketiga, menyusun kuisioner untuk mengumpulkan data persepsi para ahli mengenai perbandingan dan tingkat kepentingan antar indikator sehingga bobot setiap indikator dapat dihitung dengan menggunakan prosedur AHP. Indikator dan bobot indikator yang diperoleh merupakan kriteria yang hendaknya dipertimbangan dalam penilaian pengadaan jasa konstruksi agar dapat diperoleh kontraktor yang berkualitas dan hasil konstruksi yang sesuai dengan harapan owner serta mampu memberikan keadilan dan transparansi dalam pemilihan kontraktor dalam pengadaan jasa konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *brainstorming* dengan para ahli, dapat disusun hierarki faktor-faktor (indikator) yang dinilai dalam mengevaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konstruksi dengan metode evaluasi sistem nilai seperti Gambar 1.



Gambar 1. Hierarki indikator evaluasi pengadaan jasa konstruksi dengan sistem nilai

Bobot faktor-faktor pada setiap level ditentukan berdasarkan hasil penilaian para ahli yang berpengalaman dalam proses pengadaan jasa konstruksi dengan metode evaluasi sistem nilai. Para ahli diminta membandingkan secara berpasangan tingkat kepentingan setiap level. Pendapat para ahli mengenai tingkat kepentingan diantara pasangan indikator ditentukan dalam 9 skala tingkat kepentingan. Prioritas masing-masing kriteria dianalisis berdasarkan penilaian berpasangan antar indikator yang disajikan dalam matriks resiprokal sesuai metode AHP. Perbandingan antara aspek teknik (B) dan aspek biaya (A) disajikan pada matriks berikut:

| | | | |
|---|-----|--------|-----------|
| | A | B | Prioritas |
| A | 1 | 0,6667 | 0,400 |
| B | 1,5 | 1 | 0,600 |
| Σ | 2,5 | 1,6667 | |

Bobot aspek teknik yang diwakili oleh B adalah sebesar 0,60 atau 60%, sedangkan aspek biaya yang diwakili oleh A berbobot 0,4 atau 40%. Ini berarti bahwa untuk mendapatkan hasil konstruksi yang berkualitas, pemenang lelang tidak hanya ditentukan oleh nilai penawaran yang terendah saja, namun harus memperhitungkan profil atau kapasitas calon kontraktor untuk mengerjakan konstruksi yang akan diwujudkan. Hal ini menunjukkan juga bahwa pemilik (owner) tidak hanya mementingkan harga yang rendah tetapi

semakin mementingkan kualitas konstruksi yang akan diwujudkan.

Apabila diperhatikan sub aspek biaya, ada dua indikator yang harus dipertimbangkan yaitu nilai penawaran (C) dan kewajaran harga (D). Prioritas indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

| | | | |
|---|-------|-------|-----------|
| | C | D | Prioritas |
| C | 1 | 0,559 | 0,359 |
| D | 1,789 | 1 | 0,641 |
| Σ | 2,789 | 1,559 | |

Bobot nilai penawaran dan kewajaran harga berturut-turut adalah 0,359 atau 35,9 % dan 0,641 atau 64,1%. Ternyata para ahli berpendapat bahwa kewajaran harga lebih penting dipertimbangkan dibandingkan dengan nilai penawaran yang rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat kualitas yang tinggi memerlukan biaya dan teknologi, sehingga kontraktor dengan penawaran yang terlalu rendah perlu diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan konstruksi yang dilelang atau mungkin juga penawaran yang rendah hanya merupakan strategi untuk mendapatkan proyek saja tanpa adanya jaminan kualitas.

Dari aspek teknik, ada lima sub faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kemampuan teknik calon kontraktor yaitu : Rencana Metode Kerja (E), Kompetensi Sumber Daya manusia (F), Manajemen Waktu

(G), Sistem Penjaminan Mutu(H), Peralatan penunjang (I). Berdasarkan pendapat para ahli bobot setiap indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut padakolom prioritas.

| | E | F | G | H | I | Prioritas |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| E | 1 | 0,8644 | 0,8484 | 2,5986 | 2,2224 | 0,2251 |
| F | 1,1568 | 1 | 2,1833 | 3,5089 | 3,1933 | 0,3319 |
| G | 1,1787 | 0,458 | 1 | 4,0926 | 3,5037 | 0,2590 |
| H | 0,3848 | 0,285 | 0,2443 | 1 | 2,4126 | 0,1050 |
| I | 0,45 | 0,3132 | 0,2854 | 0,4145 | 1 | 0,0789 |
| Σ | 4,1703 | 2,9206 | 4,5614 | 11,6146 | 12,3321 | |

Bobot masing-masing indikator tersebut berturut-turut adalah : 22,51%; 33,19%;25,90%; 10,50% dan 7,89%. Kompetensi SDM merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan untuk menjamin hasil yang berkualitas, kemudian diikuti oleh kemampuan calon kontraktor mengelola waktu dan menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan.

Pada level berikutnya, Rencana Metode Kerja (RMK) terdiri atas empat sub-indikator yaitu : Keberadaan Rencana Kerja (J) dengan bobot 30,53%; Dukungan peralatan untuk metode konstruksi yang dipilih(K) berbobot 29,99%; Dukungan perolehan bahan konstruksi (L) dengan bobot 25,60% dan Dukungan tenaga yang dibutuhkan (M) dengan bobot 13,89%.

| | J | K | L | M | Prioritas |
|---|--------|--------|--------|--------|-----------|
| J | 1 | 1,0665 | 1,214 | 2,0598 | 0,3053 |
| K | 0,9377 | 1 | 1,1778 | 2,2519 | 0,2999 |
| L | 0,8237 | 0,8491 | 1 | 1,8896 | 0,256 |
| M | 0,4855 | 0,4441 | 0,5292 | 1 | 0,1389 |
| Σ | 3,2469 | 3,3596 | 3,921 | 7,2013 | |

Ini menunjukkan bahwa kemampuan membuat rencana kerja sangat penting dipertimbangkan untuk mencapai hasil yang baik. Hal ini dapat dipahami karena dengan rencana kerja yang baik menunjukkan pemahaman dan kemampuan menyelesaikan konstruksi sangat baik. Ini merupakan modal utama untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik disamping peralatan dan ketersediaan bahan konstruksi.

Kompetensi SDM juga sangat penting diperhatikan terutama kompetensi manajemen proyek (N); kepemilikan tenaga berkualifikasi ahli (O); dan kepemilikan tenaga berkualifikasi terampil (P). Bobot masing-masing sub-faktor ini ditunjukkan oleh tabel berikut:

| | N | O | P | Prioritas |
|---|--------|--------|--------|-----------|
| N | 1 | 0,2766 | 0,2501 | 0,1158 |
| O | 3,6158 | 1 | 0,778 | 0,3979 |
| P | 3,9983 | 1,2854 | 1 | 0,4863 |
| Σ | 8,6141 | 2,5619 | 2,0281 | |

Diantara ketiga sub-indikator ini tenaga terampil paling penting diantaranya, kemudian

diikuti oleh kepemilikan tenaga ahli dan kompetensi manajemen proyek. Hal ini sangat mudah dipahami, karena tenaga yang terampil dan keterlibatan tenaga ahli dalam proyek akan memudahkan pekerjaan manajemen proyek sehingga manajemen proyek tidak terlalu penting apabila para pekerja sudah terampil dan ahli.

Pada manajemen waktu, perlu dinilai mengenai keberadaan Network Planning (Q); Keberadaan Bar Chart (R); dan Keberadaan Kurva-S (S). Diantara ketiga cara untuk menyajikan rencana waktu, keberadaan Bar-Chart dianggap paling penting (39,71%) kemudian Network Planning dan Kurva-S masing-masing 30,8% dan 29,49%.

| | Q | R | S | Prioritas |
|---|--------|--------|--------|-----------|
| Q | 1 | 0,7874 | 1,0289 | 0,308 |
| R | 1,27 | 1 | 1,3672 | 0,3971 |
| S | 0,9719 | 0,7314 | 1 | 0,2949 |
| Σ | 3,2419 | 2,5188 | 3,3961 | |

Hal ini menunjukkan bahwa penyajian rencana waktu pelaksanaan cukup dengan bar chart. Hal ini dapat dipahami karena Bar Chart paling mudah dipahami dan paling populer dibandingkan dengan yang lainnya dan karena kapasitas tenaga kerja di lokasi penelitian belum baik maka penyajian yang sederhana akan lebih efektif daripada penyajian rencana waktu yang rumit seperti network planning atau yang lainnya.

Dari sisi penjaminan mutu, perlu dinilai mengenai : Mekanisme Penjaminan Mutu (T); Dukungan Penjaminan Mutu Kinerja (U); dan Dukungan Penjaminan Mutu Bahan (V) berturut-turut berbobot 65,53%; 16,39% dan 18,09%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem penjaminan mutu sangat penting diantara ketiganya. Hal ini dapat dipahami karena keberadaan sistem penjaminan mutu akan sangat mendukung terwujudnya hasil konstruksiberkualitas.

| | T | U | V | Prioritas |
|---|--------|--------|--------|-----------|
| T | 1 | 4,5556 | 3,2267 | 0,6553 |
| U | 0,2195 | 1 | 1,0239 | 0,1639 |
| V | 0,3099 | 0,9767 | 1 | 0,1809 |
| Σ | 1,5294 | 6,5322 | 5,2506 | |

Selain hal tersebut diatas, keberadaan alat penunjang seperti alat angkat (Crane)(W), alat angkut (X) dan alat ukur (Y) sangat penting untuk menjamin kualitas hasil konstruksi dan ketepatan waktu pelaksanaan konstruksi. Bobot masing-masing indikator ini

ditunjukkan oleh tabel berikut pada kolom prioritas: 41,04%; 13,87%; dan 45,1%.

| | W | X | Y | Prioritas |
|---|--------|--------|--------|-----------|
| W | 1 | 3,1061 | 0,8675 | 0,4104 |
| X | 0,3219 | 1 | 0,3222 | 0,1387 |
| Y | 1,1528 | 3,1034 | 1 | 0,451 |
| Σ | 2,4747 | 7,2096 | 2,1897 | |

Kriteria Evaluasi Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Sistem Nilai

Dari hasil perhitungan bobot/prioritas kriteria, sub kriteria dan sub-sub kriteria yang telah dilakukan, selanjutnya dapat dihitung prioritas atau bobot akhir setiap elemen kriteria secara keseluruhan untuk proses evaluasi sistem nilai (*merit point system*) pada proses pengadaan jasa pemborongan, sesuai dengan Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Pengadaan Jasa dengan Sistem Nilai

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Indikator penilai pengadaan konstruksi dengan sistem nilai | Aspek biaya (40%) | Kewajaran harga (64,14%) | | |
| | | Penawaran harga (35,86%) | | |
| | Aspek teknik (60%) | Metode konstruksi (22,51%) | Metode kerja (30,53%) | |
| | | | Dukungan Peralatan (29,99%) | |
| | | | Dukungan bahan (25,60%) | |
| | | | Dukungan pekerja (13,89%) | |
| | | Kompetensi SDM (33,19%) | Kompetensi manajemen proyek (11,58%) | |
| | | | Tenaga kualifikasi ahli (39,79%) | |
| | | | Tenaga kualifikasi terampil (48,63%) | |
| | | Peralatan Penunjang (25,90%) | Dukungan alat angkat (30,80%) | |
| | | | Dukungan alat angkut (39,71%) | |
| | | | Dukungan alat ukur (29,49%) | |
| | | Manajemen waktu (10,50%) | Keberadaan network planning (65,53%) | |
| | | | Keberadaan barchart (16,39%) | |
| | | | Keberadaan S-Curve (18,09%) | |
| Sistem Penjaminan Mutu (7,89%) | Mekanisme penjaminan mutu (41,04%) | | | |
| | Dukungan penjaminan mutu kinerja (13,87%) | | | |
| | Dukungan penjaminan mutu bahan (45,10%) | | | |

Persepsi Responden Terhadap Metode Evaluasi Sistem Nilai

Untuk mengetahui persepsi praktisi terhadap metode evaluasi sistem nilai, para praktisi diberikan kuisisioner mengenai pemahaman para aktor terhadap sistem nilai, tingkat keberhasilan sistem nilai dan kesulitan penerapan sistem nilai. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem nilai kurang populer sebagai metode evaluasi pengadaan jasa konstruksi, tetapi evaluasi dengan sistem nilai dapat menjamin kualitas dengan syarat kriteria penilaiannya yang jelas dan terukur sudah termasuk dalam dokumen lelang. Kesulitan utama yang dihadapi oleh para pelaku adalah sulitnya menetapkan kriteria dan evaluasi yang relatif lebih rumit dibandingkan dengan sistem gugur. Ini menunjukkan bahwa kapasitas tenaga kerja yang terlibat pada proses pelelangan perlu ditingkatkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Melalui analisa dan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode AHP (*analytic Hierarchi Process*) terhadap kriteia atau faktor-faktor serta bobot penilaian pada pelaksanaan pengadaan jasa kostruksi yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai (*merit point system*), dapat disimpulkan bahwa : 1) Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menilai kemampuan teknis kontraktor adalah rencana metode kerja (RMK)dengan bobot 22,51 %, terdiri atas penjelasan RMK, keberadaan dukungan peralatan, bahan dan tenaga kerja. 2) Kompetensi Personalia dengan bobot 33,19%, terdiri atas kompetensi manajemen proyek, keberadaan tenaga kualifikasi ahli, keberadaan tenaga kualifikasi rerampi. 3) keberadaan peralatan penunjang(25,90 %) terdiri atas keberadaan alat angkat, alat angkut dan alat ukur. 4) Manajemen Rencana Waktu dengan

bobot 10,50% terdiri atas : Keberadaan *network planning*, *Bar Chart*, kurva S. 5) Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu dengan bobot 7,89 % terdiri atas keberadaan prosedur penjaminan mutu, dukungan penjaminan mutu kinerja, dukungan penjaminan mutu bahan.

Dari segi biaya, harus dinilai kewajaran harga dan nilai penawarannya, dengan rasio 64,14% dan 35,86%. Secara keseluruhan perbandingan bobot aspek teknis dan biaya adalah 60% berbanding 40%.

Keberhasilan metode evaluasi lelang pengadaan konstruksi tergantung dari kemampuan panitia dan kejelasan kriteria penilaian dalam dokumen lelang. Apabila hal ini terpenuhi, tingkat kepuasan pemilik akan lebih tinggi daripada metode evaluasi dengan sistem gugur.

Saran

Evaluasi lelang dengan sistem nilai perlu diperluas penerapan baik dalam praktik maupun bidang lain seperti pelelangan barang-barang pabrikasi seperti elektronik, mesin dan peralatan khusus seperti peralatan laboratorium serta barang yang sangat spesifik seperti tumbuhan dan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. dan Wirahadikusumah, R. D., 2005, *Model Penilaian Kewajaran Harga Penawaran Kontraktor dengan Sistem Evaluasi Nilai*, Jurnal Teknik Sipil, ITB, Vol. 12 No. 3, 2005.
- Eriksson, E.P. and Westerberg, M., 2011, *Effects of cooperative procurement procedures on construction project performance: A conceptual framework*, International Journal of Project Management Volume 29, Issue 2, February 2011, Pages 197-208, diakses tgl 10 Maret 2011, pk. 10.30
- Golden B L, Wasil E A and Levy D E, *Application of AHP : A Categorized, Annotated Bibliography : In : The AHP Application and Status* (Eds: Bruu G, Wasil E and Harker P), Springer Verlag, 2989, Berlin 37 – 48
- Hendrickson C, 2000, *Project Management for Construction, 2nd Edition*, Prentice Hall, 2000.
- Kartasmita, H. A. G, 2006, *Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menurut Pelaku Usaha*, naskah lengkap Ketua Umum BPP Gapensi dalam Seminar Nasional dengan Tema “Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah”, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 23 Agustus 2006
- Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 120, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003
- Marimin. 2004. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2004
- Mustafa, K., *Panitia, berhati-hatilah menggunakan metode evaluasi sistem nilai*, <http://www.khalidmustafa.wordpress.com>, Khalid Mustafa Weblog, Weblog, 17 September 2010, MHTML Document, diakses tgl 10 Desember 2010, pk. 00.55
- Pemerintah Republik Indonesia, 2000, *Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2010
- Saaty, TL, 1993, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*, Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- True, N.F., 1988, *Determining the Accuracy of a Cost Estimate*, AACE Transaction, T.2.1 – T.2.10, 1988.